

STATISTIK INFRASTRUKTUR KABUPATEN KEBUMEN 2020





STATISTIK INFRASTRUKTUR KABUPATEN KEBUMEN 2020

STATISTIK INFRASTRUKTUR KABUPATEN KEBUMEN 2020

(Hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020)

ISBN	: 978-623-6248-08-9
No. Publikasi	: 33050.2113
Katalog BPS	: 1105026.3305
Ukuran Buku	: 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: xiv + 70 Halaman
Naskah	: Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Kebumen
Gambar Kulit	: Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Kebumen
Diterbitkan oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Statistik Infrastruktur Kabupaten Kebumen 2020

(Hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020)

Pengarah:

Kus Haryono, S.ST, M.Si.

Penanggungjawab:

Yuddy Kristian, S.ST, M.Stat.

Editor:

Yuddy Kristian, S.ST, M.Stat.

Moh. Muchaeri, S.St.

Drs. Adi Suswantoro

Penulis:

Suharto

Pengolah Data:

Suharto

Desain Kulit dan Tata Letak:

Suharto

<https://kebumenkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Statistik Infrastruktur Kabupaten Kebumen 2020 merupakan publikasi hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating* Potensi Desa) 2020. Publikasi ini memuat data dan informasi terkait keberadaan infrastruktur yang ada di tingkat desa/kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Data dan informasi infrastruktur yang disajikan meliputi: infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur milik desa.

Publikasi ini diharapkan dapat menjadi gambaran capaian pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Publikasi ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi infrastruktur berbasis wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di pusat maupun di daerah, peneliti, akademisi, serta pemakai data pada umumnya.

Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi pengguna data dan semua pihak yang berkepentingan. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Kebumen, April 2021
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN



Kus Haryono, S.St, M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pembangunan Daerah	3
1.2. Hasil Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020	6
1.3. Infrastruktur dalam Pembangunan Nasional	7
BAB II. INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR	11
2.1. Pelayanan Dasar	13
2.2. Pendidikan	13
2.3. Kesehatan	20
BAB III. INFRASTRUKTUR EKONOMI	23
3.1. Perekonomian Kabupaten Kebumen	25
3.2. Perdagangan	25
3.3. Akomodasi	27
3.4. Bank dan Koperasi	28
BAB IV. INFRASTRUKTUR MILIK DESA	33
4.1. Pembangunan Desa	35
4.2. Embung	36
4.3. Badan Usaha Milik Desa	38
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43
CATATAN TEKNIS	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Jumlah SD/MI dan Desa/Kelurahan yang Ada SD/MI di Kabupaten Kebumen, 2014-2020	14
Gambar 2. Jumlah Desa yang Ada Fasilitas SD/MI per Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2020.....	15
Gambar 3. Jumlah SD/MI Menurut Statusnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020	15
Gambar 4. Jumlah Fasilitas SMP/MTs per Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2020	16
Gambar 5. Jumlah Fasilitas dan Jumlah Kecamatan Ada Fasilitas SMP/MTs di Kabupaten Kebumen, 2014-2020	17
Gambar 6. Jumlah Fasilitas SMP/MTs Menurut Statusnya di Kabupaten Kebumen, 2020	17
Gambar 7. Jumlah Fasilitas SMA/MA/SMK per Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2020	18
Gambar 8. Jumlah Fasilitas SMA/MA/SMK Menurut Statusnya di Kabupaten Kebumen, 2019.....	19
Gambar 9. Jumlah Fasilitas dan Jumlah Kecamatan Ada Fasilitas Akademi/Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen, 2014-2020.....	20
Gambar 10. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kebumen, 2014-2020.....	21
Gambar 11. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kebumen, 2014-2020	22
Gambar 12. Persentase Kecamatan yang Terdapat Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020	26
Gambar 13. Persentase Kecamatan yang Terdapat Sarana Akomodasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020.....	27
Gambar 14. Persentase Kecamatan yang Terdapat Bank Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020	29
Gambar 15. Persentase Kecamatan yang terdapat Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020.....	31

Gambar 16. Perkembangan Jumlah Embung Desa di Kabupaten Kebumen, 2018-2020	37
Gambar 17. Perkembangan Persentase Desa yang Terdapat Minimal Satu Embung di Kabupaten Kebumen, 2018-2020	37
Gambar 18. Perkembangan Persentase Desa yang Terdapat Minimal Satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kebumen 2018-2020	39
Gambar 19. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kebumen, 2018-2020	39

<https://kebumenkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Banyaknya Wilayah Administrasi Setingkat Desa Menurut Status Pemerintahan, 2020	45
Lampiran 2. Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020.....	46
Lampiran 3. Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020.....	47
Lampiran 4. Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020.....	48
Lampiran 5. Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020	49
Lampiran 6. Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020	50
Lampiran 7. Banyaknya Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Menurut Kecamatan, 2020.....	51
Lampiran 8. Banyaknya Puskesmas dengan Rawat Inap dan Tanpa Rawat Inap Menurut Kecamatan, 2020	52
Lampiran 9. Banyaknya Pasar Menurut Kecamatan, 2020	53
Lampiran 10. Banyaknya Hotel dan Penginapan Menurut Kecamatan, 2020.....	54
Lampiran 11. Banyaknya Bank Menurut Kecamatan, 2020.....	55
Lampiran 12. Banyaknya Koperasi Menurut Kecamatan, 2020	56
Lampiran 13. Banyaknya Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Menurut Kecamatan, 2020	57
Lampiran 14. Banyaknya Embung di Desa Menurut Provinsi, 2020.....	58
Lampiran 15. Kuesioner Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 (PODES2020.UPDATING).....	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini adalah lambatnya pembangunan infrastruktur. Berdasarkan laporan *Global Competitiveness Report 2019* yang disusun oleh *World Economic Forum*, Indonesia memasuki peringkat ke-50 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Infrastruktur tidak hanya membahas bangunan fisik saja, infrastruktur nonfisik seperti kesehatan, kualitas SDM, dan kesejahteraan sosial juga perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Akan tetapi, perekonomian negara bisa berjalan cenderung tidak efisien, jika biaya logistik sangat tinggi yang berujung pada kurangnya daya saing. Inilah pentingnya keseimbangan membangun infrastruktur fisik dan nonfisik bagi suatu negara.

Kabupaten Kebumen telah mencanangkan sasaran utama pembangunan nasional untuk periode tahun 2016-2021. Salah satunya pada sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, seperti dalam hal pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, target yang ingin dicapai salah satunya adalah peningkatan derajat pendidikan masyarakat. Sementara, pada bidang kesehatan, target yang ingin dicapai salah satunya adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Publikasi Statistik Infrastruktur ini merangkum keberadaan maupun jumlah fasilitas dalam 3 bagian yaitu Pelayanan Dasar, Ekonomi, dan Infrastruktur Milik Desa. Sumber data diperoleh dari hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

Fasilitas pendidikan di Kabupaten Kebumen tersedia dalam jumlah 916 SD/MI, 208 SMP/MTs, 49 SMA/MA, 67 SMK, dan 10 Akademi/Perguruan Tinggi. Untuk sekolah setingkat SD penyebarannya sudah cukup merata, hampir seluruh desa/kelurahan ada fasilitas pendidikan setingkat SD, hanya 2 desa yang belum memiliki fasilitas pendidikan setingkat SD dari 460 desa/kelurahan yang ada di

wilayah ini. Demikian pula untuk fasilitas pendidikan setingkat SMP, persebarannya sudah merata, setiap kecamatan minimal sudah memiliki 3 fasilitas pendidikan setingkat SMP. Sedangkan untuk sekolah setingkat SMA dan SMK, masih ada beberapa kecamatan yang belum memilikinya. Hasil *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020* menunjukkan bahwa, masih ada sekitar 7,69 persen kecamatan yang tidak ada fasilitas pendidikan setingkat SMA.

Sementara itu, fasilitas kesehatan di Kabupaten Kebumen tersedia dalam jumlah 11 rumah sakit, 12 puskesmas rawat inap dan 24 puskesmas tanpa rawat inap. Pada tahun 2020 persentase kecamatan yang memiliki rumah sakit sudah mencapai 30,77 persen.

Data infrastruktur ekonomi menyebutkan bahwa 92,31 persen kecamatan di Kabupaten Kebumen sudah tersedia Bank Umum Pemerintah, 96,15 persen sudah tersedia pasar dengan bangunan permanen, 88,46 persen terdapat Kospin (Koperasi Simpan Pinjam), dan 30,80 persen kecamatan di Kabupaten Kebumen sudah tersedia sarana akomodasi penginapan.

Selain itu, hasil *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020* menyebutkan bahwa terdapat infrastruktur milik desa yakni BUMDes. Sebanyak 79,36 persen desa di Kabupaten Kebumen telah terdapat minimal satu unit usaha BUMDes dengan rata-rata kepemilikan sebanyak 1-2 unit BUMDes per desa. Selain BUMDes, pemerintah juga mendorong desa untuk membangun embung. Pembangunan embung desa merupakan bagian dari empat program prioritas pembangunan desa yaitu Prukades, BUMDes, embung desa, dan sarana olahraga desa. Dari hasil *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020* diketahui bahwa sekitar 5,01 persen desa telah memiliki minimal 1 buah embung.

BAB I PENDAHULUAN

UU RI No. 17 Tahun 2007

"Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD RI Tahun 1945"

"Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua"

SDGs

Tujuan ke-9 Target ke-1

1.1. Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan tujuan negara Indonesia, pemerintah melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Pelaksanaan upaya pembangunan, dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya (Penjelasan atas UU RI No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025).

Tantangan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan wibawa negara mencakup peningkatan stabilitas dan keamanan negara, pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, serta pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat sendi perekonomian bangsa, tantangan utama pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan. Sementara itu, dalam rangka memperbaiki krisis kepribadian bangsa termasuk intoleransi, tantangan utama pembangunan mencakup peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan kelautan (Bappenas, 2014).

Adapun visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 seperti tercantum dalam RPJMN 2020-2024, adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat tujuh agenda pembangunan lima tahun ke depan. *Pertama*, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang dititikberatkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi. *Kedua*, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah. *Ketiga*, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada pemenuhan layanan dasar seperti pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. *Keempat*, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik, serta pembangunan etos kerja. *Kelima*, memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. *Keenam*, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. *Ketujuh*, memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Program pembangunan nasional ini juga selaras dengan tujuan SDGs, atau dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. Beberapa tujuan SDGs yaitu terkait kesehatan, pendidikan, lingkungan, kesetaraan gender, dan pengurangan kesenjangan.

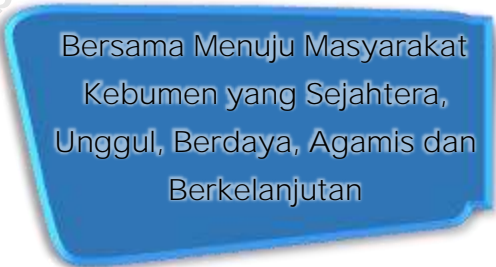
Sedangkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen seperti termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, adalah: "Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis"

Pada tataran yang lebih operasional, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. mengurangi tingkat kemiskinan penduduk;
3. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar di wilayah strategis;
4. mengembangkan agrobisnis serta usaha mikro, kecil dan menengah untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan; dan
5. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta di semua elemen kemasyarakatan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen

ditetapkan visi pembangunan daerah tahun 2016-2021 adalah: "Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan"



Bersama Menuju Masyarakat
Kebumen yang Sejahtera,
Unggul, Berdaya, Agamis dan
Berkelanjutan

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan

budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;

3. mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. meningkatkan perekonomian daerah yang memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan
6. memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan system pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

1.2. Hasil Pendataan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan oleh BPS sejak tahun 1980. Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Namun, mendesaknya kebutuhan

data Podes yang ter-*update* setiap tahun, maka BPS perlu melakukan *updating* data Podes. Data Podes yang di-*update* mencakup antara lain pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020*) yang dilaksanakan setiap tahun di luar tahun pendataan Podes.

Hasil *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020* diharapkan mampu memberi gambaran pencapaian hasil pembangunan yang ada di Indonesia, khususnya pembangunan di desa atau wilayah lain setingkat desa. *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020* mencakup seluruh wilayah administrasi setingkat desa, termasuk kelurahan, nagari, serta Unit Permukiman Transmigrasi/Satuan Permukiman Transmigrasi (UPT/SPT).

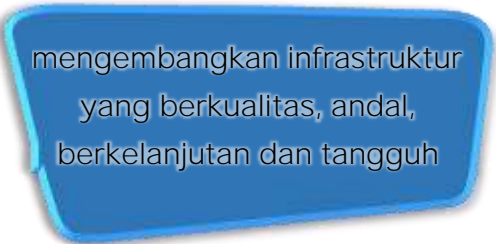
Berdasarkan hasil *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020*, di Kabupaten Kebumen terdapat sebanyak 460 wilayah setingkat desa yang terdapat pada 26 kecamatan. Dari 460 wilayah setingkat desa terdapat 449 desa dan 11 kelurahan.

Cakupan wilayah *Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020* adalah seluruh wilayah administrasi setingkat desa yang memenuhi tiga persyaratan yang ditetapkan yaitu: (1) adanya wilayah desa/kelurahan, (2) ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan, dan (3) ada pemerintahan desa/kelurahan.

1.3. Infrastruktur dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional tidak bisa lepas dari pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang terus digencarkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meningkatnya investasi dan meningkatnya devisa negara melalui pariwisata semakin terbuka lebar dengan perbaikan dan dukungan pembangunan infrastruktur fisik suatu wilayah.

Pembangunan infrastruktur yang tangguh menjadi salah satu tujuan dari SDGs, lebih tepatnya tujuan kesembilan. Adapun target pertama pada tujuan kesembilan adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Hal ini semakin memperkuat pentingnya infrastruktur dalam pembangunan nasional.



mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh

Selain membangun secara fisik, pemerintah juga patut memperhatikan perkembangan sumber daya manusia. Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan manusia dan masyarakat, adalah dalam hal pendidikan dan kesehatan. Pada bidang pendidikan, target yang ingin dicapai salah satunya adalah peningkatan persentase sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA. Sementara, pada bidang kesehatan, target yang ingin dicapai salah satunya adalah dalam satu kecamatan minimal memiliki satu puskesmas terakreditasi.

Membangun dari desa menjadi komitmen lain pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Strategi pembangunan nasional yang tercantum berfokus pada dimensi pemerataan dan kewilayahan, dengan prioritas pembangunan di wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di desa dan wilayah pinggiran menjadi prioritas pada pembangunan nasional periode tahun 2015-2019. Pembangunan di wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur ini tidak lepas juga dengan pembangunan infrastruktur.

Adapun dalam publikasi ini akan dibahas terkait infrastruktur yang ada di Kabupaten Kebumen. Infrastruktur yang akan dibahas yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur milik desa. Data yang

digunakan merupakan hasil Podes 2014-2018 dan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*) 2019. Infrastruktur pelayanan dasar mencakup fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Infrastruktur ekonomi mencakup fasilitas bank, koperasi, dan akomodasi penginapan, dan infrastruktur milik desa yang terdiri atas BUMDes dan embung.

<https://kebumenkab.bps.go.id>

BAB II INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR

2020

(PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)

916 SD/MI

208 SMP/MTs

49 SMA/MA

67 SMK

10 Akademi/Perguruan Tinggi

Fasilitas Pendidikan



Fasilitas Kesehatan



11

Rumah Sakit

12

Puskesmas Dengan Rawat Inap

24

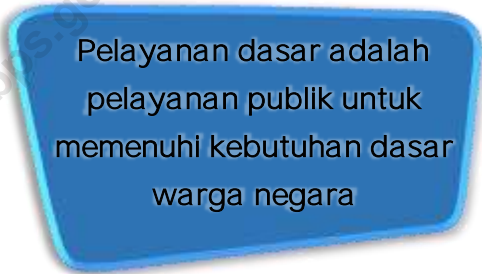
Puskesmas Tanpa Rawat Inap

2.1. Pelayanan Dasar

Pada salah satu sasaran pembangunan nasional periode 2015-2019, yaitu pada sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan, terdapat target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penerapan SPM ini sebagai salah satu cara penguatan tata kelola pemerintah daerah. Standar Pelayanan Minimal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. secara minimal (PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM). Adapun

pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu sendiri terdiri atas enam urusan, di antaranya adalah pendidikan dan kesehatan.



Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara

2.2. Pendidikan

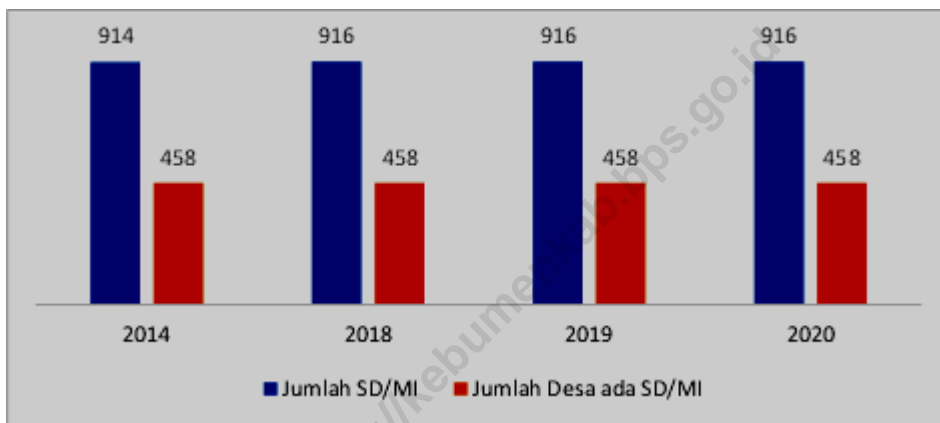
Pendidikan merupakan salah satu hal yang menjadi target pembangunan nasional. Pendidikan juga menjadi tujuan SDGs, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Ada berbagai macam ukuran atau indikator yang mengukur keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu indikatornya adalah persentase SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B.

Dalam Pendataan Potensi Desa dan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa ada data terkait sarana pendidikan dari jenjang pendidikan dasar hingga

pendidikan tinggi. Pendidikan dasar berupa Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan menengah berupa Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Terakhir, pendidikan tinggi terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.

2.2.1. Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)

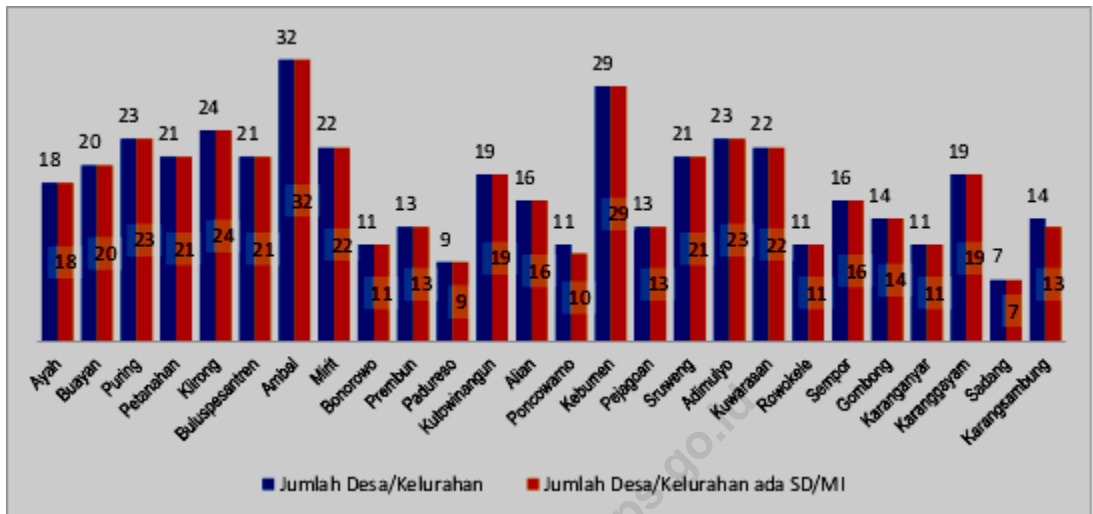
Gambar 1. Jumlah SD/MI dan Desa/Kelurahan yang Ada SD/MI di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 mencatat bahwa jumlah fasilitas pendidikan SD/MI di Kabupaten Kebumen sebanyak 916 buah, atau 1 – 2 buah SD/MI per desa. Namun masih ada 2 desa (0,43%) yang belum memiliki fasilitas pendidikan SD/MI, yaitu Desa Kedungdowo di Kecamatan Poncowarno dan Desa Pencil di Kecamatan Karangsembung. Gambar 1. menunjukkan banyaknya fasilitas pendidikan SD/MI dan jumlah desa/kelurahan yang ada fasilitas pendidikan SD/MI hasil Podes 2014-2020 di Kabupaten Kebumen.

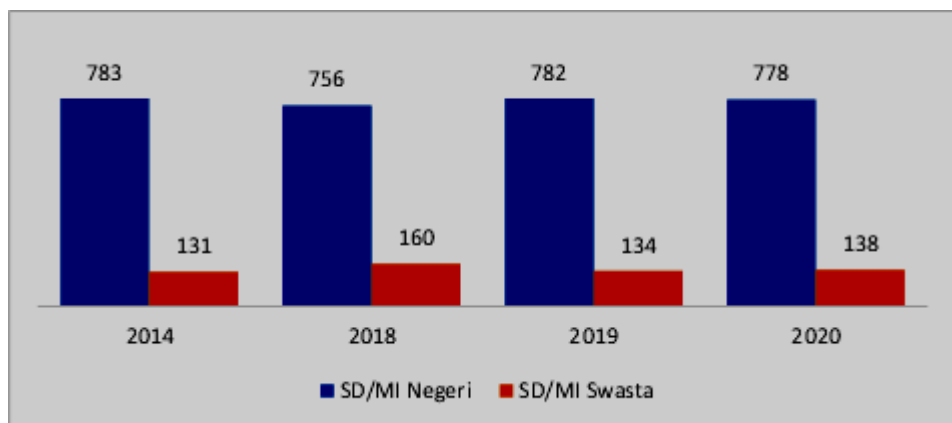
Gambar 2. Jumlah Desa yang Ada Fasilitas SD/MI per Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2020



Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Dari jumlah fasilitas SD/MI yang tercatat, sebanyak 84,93 persen adalah Sekolah Dasar (SD) dan 15,07 persen adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI). Secara lebih rinci untuk SD sendiri terdiri dari 96,39 persen merupakan SD Negeri dan 3,61 persen merupakan SD Swasta. Dan untuk MI, hanya 3,54 persen yang merupakan MI Negeri, selebihnya merupakan MI Swasta.

Gambar 3. Jumlah SD/MI Menurut Statusnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



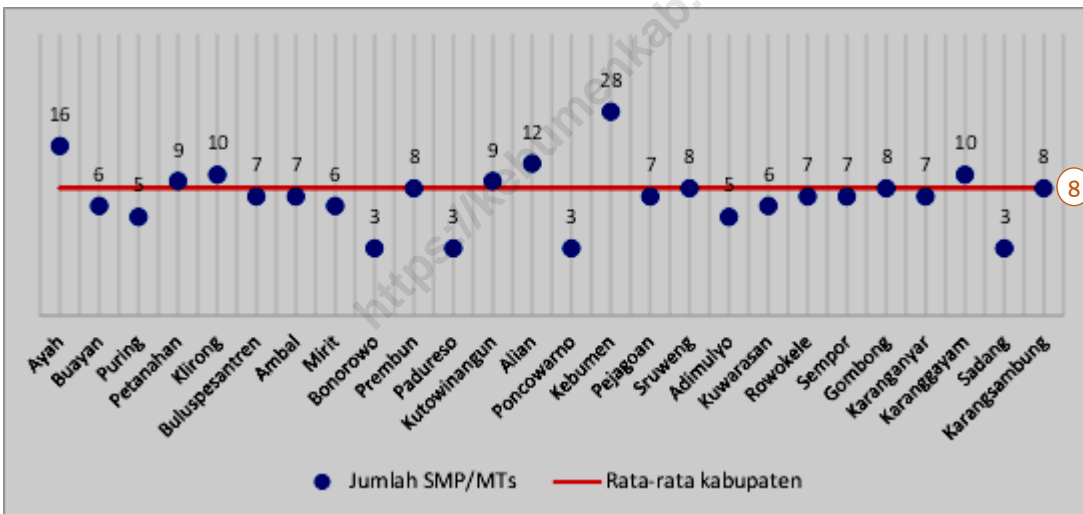
Sumber: BPS, Podes 2014-2019

Gambar 3. memperlihatkan perkembangan jumlah SD/MI menurut statusnya di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2014-2020.

2.2.2. Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)

Sejak 2014 hingga 2020, setiap kecamatan di Kabupaten Kebumen minimal sudah memiliki 3 buah fasilitas pendidikan SMP/MTs. Pada tahun 2020 sebanyak 7 kecamatan dari total 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen sudah memiliki sarana pendidikan SMP/MTs diatas rata-rata kabupaten. Gambar 4. memperlihatkan jumlah fasilitas pendidikan SMP/MTs per kecamatan dibanding rata-rata kabupaten, hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

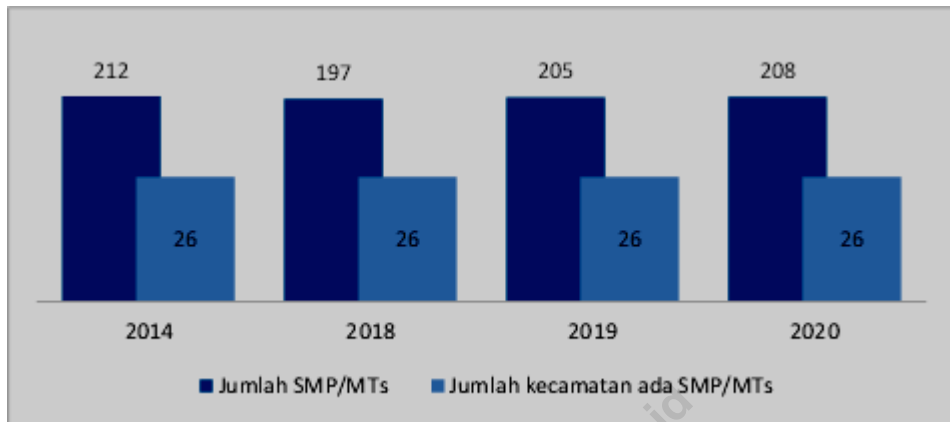
Gambar 4. Jumlah Fasilitas SMP/MTs per Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2020



Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

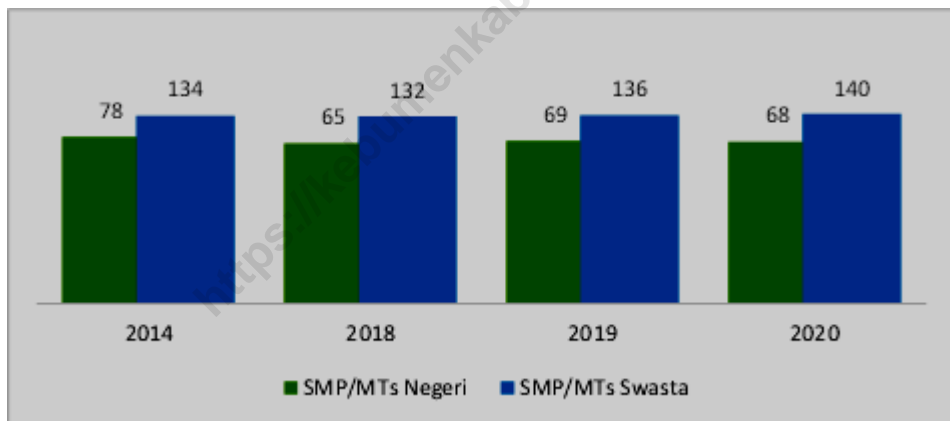
Dari jumlah fasilitas pendidikan SMP/MTs sebanyak 208 buah yang tercatat pada Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020, sebanyak 56,25 persen adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 43,75 persen adalah Madrasah Tsanawiyah (MTs). Secara lebih rinci untuk SMP sendiri terdiri dari 50,43 persen merupakan SMP Negeri dan 49,57 persen merupakan SMP Swasta. Dan untuk MTs, hanya 9,89 persen yang merupakan MTs Negeri, dan 90,11 persen merupakan MTs Swasta.

Gambar 5. Jumlah Fasilitas dan Jumlah Kecamatan Ada Fasilitas SMP/MTs di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Gambar 6. Jumlah Fasilitas SMP/MTs Menurut Statusnya di Kabupaten Kebumen, 2020



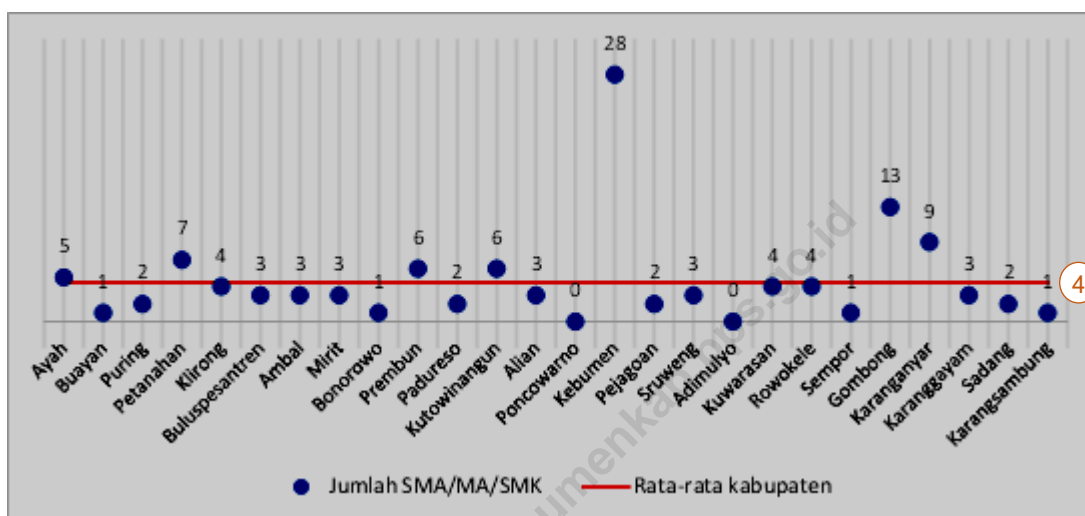
Sumber: BPS, Podes 2014-2020

2.2.3. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Setelah pendidikan dasar ada pendidikan menengah, yaitu SMA/MA atau SMK. Sejak adanya peraturan wajib belajar 12 tahun, kebutuhan akan fasilitas pendidikan menengah menjadi semakin meningkat. Pada tahun 2020, hasil Updating Podes mencatat di Kabupaten Kebumen terdapat fasilitas pendidikan menengah sebanyak 116 buah, namun sayangnya belum semua kecamatan di Kabupaten Kebumen ada fasilitas pendidikan menengah. Untuk memenuhi kebutuhan ini,

perlu fasilitas pendidikan menengah baru yang dibangun. Gambar 7 memperlihatkan jumlah fasilitas pendidikan menengah per kecamatan dibanding rata-rata kabupaten, hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020.

Gambar 7. Jumlah Fasilitas SMA/MA/SMK per Kecamatan di Kabupaten Kebumen, 2020

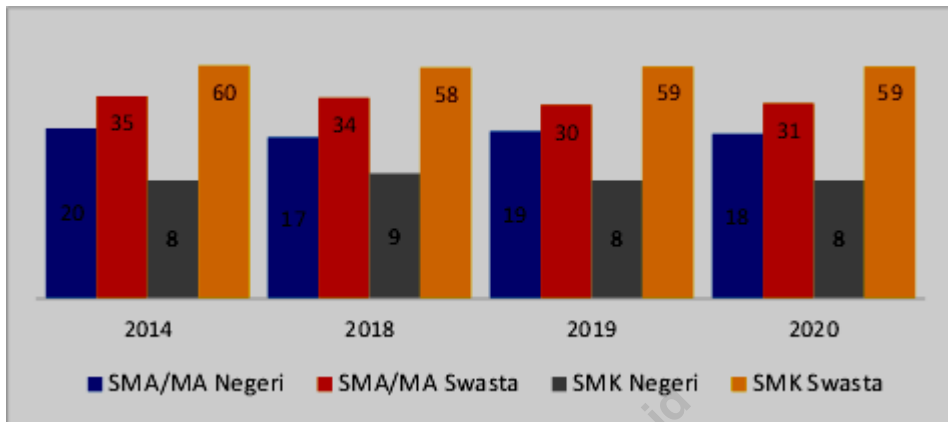


Sumber: BPS, Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Meskipun fasilitas pendidikan menengah sudah cukup layak, namun persebaran pembangunan SMA/MA/SMK masih belum merata, masih terkonsentrasi di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Kebumen (24,14%), Kecamatan Gombong (11,21%), Kecamatan Karanganyar (7,76%) kemudian Kecamatan Petanahan (5,17%).

Dari 116 buah fasilitas SMA/MA/SMK yang tercatat dari hasil Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020, 42,24 persen berupa SMA/MA dan 57,76 persen berupa SMK. Untuk fasilitas pendidikan SMA/MA sendiri terdiri dari 36,73 persen SMA/MA Negeri dan 63,27 persen SMA/MA Swasta dan untuk fasilitas pendidikan SMK terdiri dari 11,94 persen SMK Negeri dan 88,06 SMK Swasta.

Gambar 8. Jumlah Fasilitas SMA/MA/SMK Menurut Statusnya di Kabupaten Kebumen, 2019



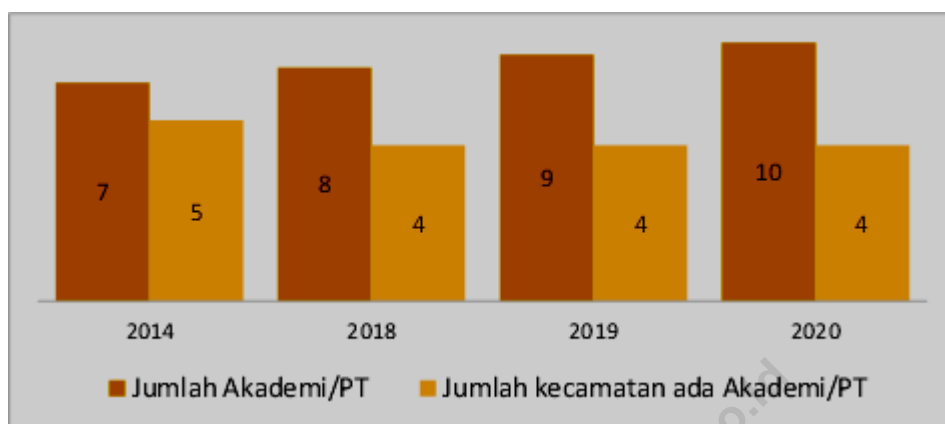
Sumber: BPS, Podes 2014-2020

2.2.4. Akademi/Perguruan Tinggi (PT)

Meskipun wajib belajar hanya 12 tahun, yang berarti hanya sampai pendidikan menengah, namun telah banyak penduduk Indonesia yang tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Hal ini karena semakin tingginya tuntutan/persyaratan untuk mencari kerja yang semakin tinggi dengan banyaknya persaingan yang ada. Pekerjaan dengan gaji yang tinggi biasanya memberikan persyaratan minimum pendidikannya perguruan tinggi, baik sarjana maupun diploma.

Pada tahun 2020, di Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 10 buah fasilitas Akademi/Perguruan Tinggi, meningkat 3 buah dibanding tahun 2014. Kesemua Akademi/Perguruan Tinggi tersebut merupakan Akademi/Perguruan Tinggi Swasta yang berlokasi di 4 kecamatan di Kabupaten Kebumen. Gambar 9. memperlihatkan perkembangan fasilitas Akademi/Perguruan Tinggi dari hasil Podes 2014-2020.

Gambar 9. Jumlah Fasilitas dan Jumlah Kecamatan Ada Fasilitas Akademi/Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

2.3. Kesehatan

Pelayanan dasar selain pendidikan yaitu kesehatan. Kesehatan ini juga menjadi tujuan SDGs, lebih tepatnya pada tujuan ketiga. Tujuan tersebut yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Seperti halnya pada pendidikan, pada kesehatan ini pun ada beberapa ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Salah satu indikatornya yaitu cakupan pelayanan kesehatan esensial (didefinisikan sebagai rata-rata cakupan intervensi yang dapat dilacak termasuk reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan kesehatan anak, penyakit menular, penyakit tidak menular, kapasitas layanan serta akses untuk penduduk secara umum dan penduduk kurang beruntung). Ukuran indikator tersebut, perlu ditunjang dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai.

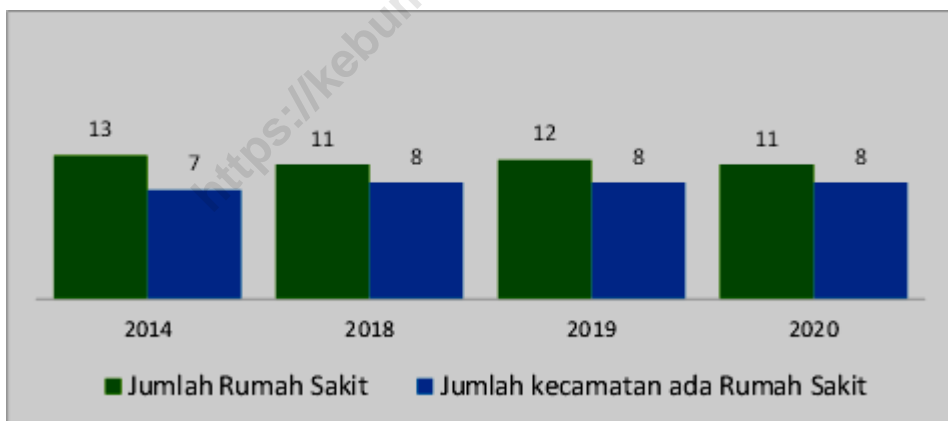
Fasilitas pelayanan kesehatan yang akan dibahas dalam publikasi ini antara lain Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Puskesmas Tanpa Rawat Inap, dan Puskesmas dengan Rawat Inap.

2.3.1. Rumah Sakit

Rumah Sakit adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Keberadaan rumah sakit pada setiap kabupaten/kota sangat penting untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Seperti terlihat pada gambar 10, pada tahun 2014 jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen tercatat sebanyak 13 buah yang tersebar di 7 kecamatan dari 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Kecamatan Kebumen adalah kecamatan dimana terdapat paling banyak rumah sakit (6 buah), kemudian diikuti Kecamatan Gombong (2 buah) dan Kecamatan Buayan, Petanahan, Kutowinangun, Sruweng dan Kuwarasan masing-masing 1 buah rumah sakit.

Gambar 10. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

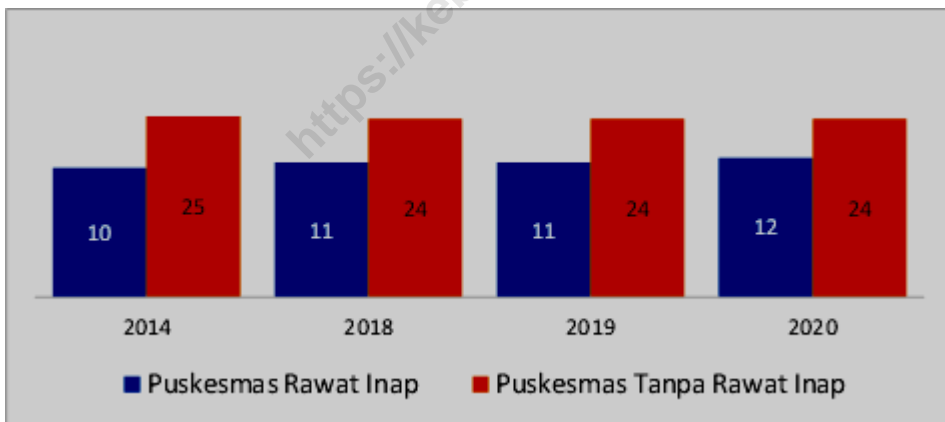
Kemudian pada tahun 2018, karena regulasi 3 buah rumah sakit di Kecamatan Kebumen tidak lagi termasuk klasifikasi sebagai rumah sakit, sehingga jumlah rumah sakit di Kecamatan Kebumen hanya tinggal 3 buah. Di sisi lain di Kecamatan Prembun berdiri 1 buah rumah sakit baru, sehingga jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen adalah sebanyak 11 buah. Dan pada tahun 2019 berdiri lagi 1 buah rumah sakit di Kecamatan Gombong, sehingga secara keseluruhan jumlah

rumah sakit di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019 sebanyak 12 buah. Kemudian pada tahun 2020 dari 2 buah rumah sakit di Kecamatan Gombang yaitu Rumah Sakit Palang Biru yang pada tahun 2019 beroperasi di 2 desa/kelurahan (Kelurahan Gombang dan Desa Kedungpuji), sepenuhnya operasionalnya dipindahkan ke rumah sakit di Desa Kedungpuji. Sehingga pada tahun 2020 jumlah rumah sakit di Kabupaten Kebumen kembali menjadi 11 buah.

2.3.2. Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Puskesmas dibedakan antara puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap.

Gambar 11. Jumlah Puskesmas di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama sangat penting keberadaan dan kemudahan aksesnya bagi masyarakat. Selama kurun waktu 2014-2020, setiap kecamatan di Kabupaten Kebumen sudah ada puskesmas minimal 1 buah. Gambar 11. memperlihatkan banyaknya Puskesmas dari tahun 2014 hingga 2020, yang tercatat dari pencacahan Podes.

BAB III INFRASTRUKTUR EKONOMI

2020



100%

KECAMATAN DI KAB. KEBUMEN
TERDAPAT **PASAR**



96,15%
Kecamatan Memiliki

Pasar dengan Bangunan
Permanen



96,15%
Kecamatan Memiliki

Pasar dengan Bangunan
Semi Permanen



92,31%
Kecamatan Memiliki

Pasar Tanpa Bangunan

26,92%
Kecamatan Memiliki

Hotel



30,77%
Kecamatan Memiliki

Penginapan



38,46%

KECAMATAN DI KAB. KEBUMEN
TERDAPAT
SARANA AKOMODASI



96,15%

KECAMATAN DI KAB. KEBUMEN
TERDAPAT **BANK**



92,31%
Kecamatan Memiliki

Bank Umum Pemerintah



34,62%
Kecamatan Memiliki

Bank Umum Swasta



88,46%
Kecamatan Memiliki

Bank Perkreditan Rakyat

53,85%
Kecamatan Memiliki

KUD



19,23%
Kecamatan Memiliki

Kopinkra



76,92%
Kecamatan Memiliki

Kospin



57,69%
Kecamatan Memiliki

Koperasi
Lainnya



96,15%

KECAMATAN DI KAB. KEBUMEN
TERDAPAT **KOPERASI**



3.1. Perekonomian Kabupaten Kebumen

Pembangunan Nasional tidak lepas dengan perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia didasarkan atas asas kekeluargaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945. Asas kekeluargaan sebagai pernyataan adanya tanggung jawab bersama untuk menjamin kepentingan, kemajuan dan kemakmuran bersama layaknya makna *brotherhood*.

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019). Seperti halnya pada bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur juga memiliki peranan penting pada bidang ekonomi. Adanya infrastruktur ekonomi di suatu wilayah akan meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Efek adanya infrastruktur ekonomi terhadap kegiatan ekonomi di suatu wilayah misalnya adanya pasar di suatu wilayah, akan meningkatkan terjadinya transaksi. Selain itu, jika di suatu wilayah ada bank, maka akan meningkatkan minat masyarakat, misalnya untuk menabung di bank.

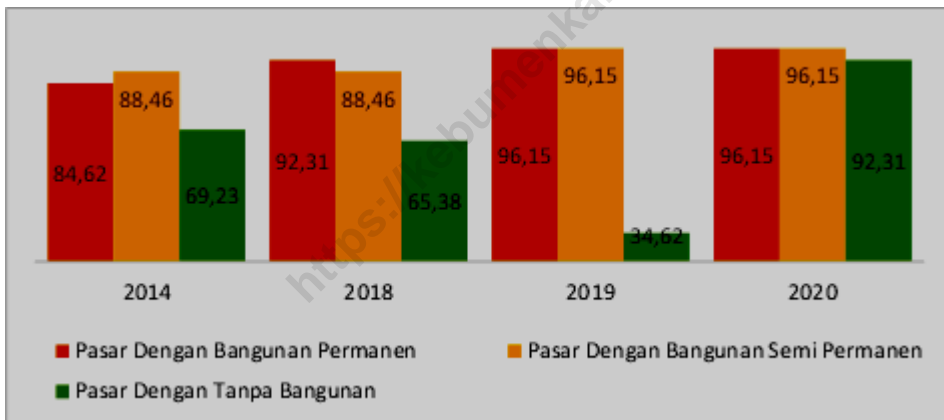
3.2. Perdagangan

Perekonomian tidak lepas dari perdagangan. Bahkan, perdagangan merupakan salah satu bidang yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Indonesia. Perdagangan sendiri dibedakan menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. Sementara itu, perdagangan eceran adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik

barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain (Perka BPS Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia).

Infrastruktur ekonomi yang mendukung terjadinya perdagangan ada berbagai macam, contohnya yaitu pasar. Selain itu, toko/warung kelontong juga dapat menjadi tempat perdagangan eceran. Lebih lanjut, toko-toko yang terkumpul membentuk kelompok pertokoan pun menjadi tempat terjadinya perdagangan.

Gambar 12. Persentase Kecamatan yang Terdapat Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Gambar 12 menunjukkan perkembangan persentase kecamatan yang terdapat pasar menurut jenisnya. Ada pun pasar yang dicakup dalam podes adalah pasar dengan bangunan permanen, pasar dengan bangunan semi permanen, dan pasar tanpa bangunan. Jika dilihat dari persentasenya secara total, seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen telah memiliki setidaknya satu jenis pasar. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa relatif sudah meratanya pembangunan pasar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kebumen. Secara umum, persentase kecamatan yang terdapat pasar dengan bangunan permanen cenderung

mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Hal ini berlaku juga untuk persentase jumlah kecamatan yang terdapat pasar dengan bangunan semi permanen maupun pasar tanpa bangunan.

3.3. Akomodasi

Gambar 13. Persentase Kecamatan yang Terdapat Sarana Akomodasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Kegiatan ekonomi tidak selalu terkait jual beli barang. Ada beberapa kegiatan ekonomi yang terjadi yaitu jual beli jasa, salah satunya adalah jasa akomodasi. Akomodasi ini adalah fasilitas penginapan, yang dapat berupa hotel atau penginapan lainnya. **Hotel** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dan lain-lain) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel. Sementara **penginapan** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel. Adapun yang dicatat dalam Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 mencakup hotel, motel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma, dan sejenisnya.

Pada Gambar 13 menunjukkan bahwa persentase kecamatan yang terdapat sarana akomodasi berupa hotel atau penginapan relatif meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana akomodasi dari tahun ke tahun semakin baik. Selain itu, dapat terlihat juga bahwa persentase kecamatan yang terdapat penginapan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 peningkatannya lebih cepat dari pada persentase kecamatan yang terdapat hotel. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan sarana akomodasi penginapan cenderung tersebar secara lebih merata dibandingkan dengan sarana akomodasi hotel.

3.4. Bank dan Koperasi

3.4.1. Bank

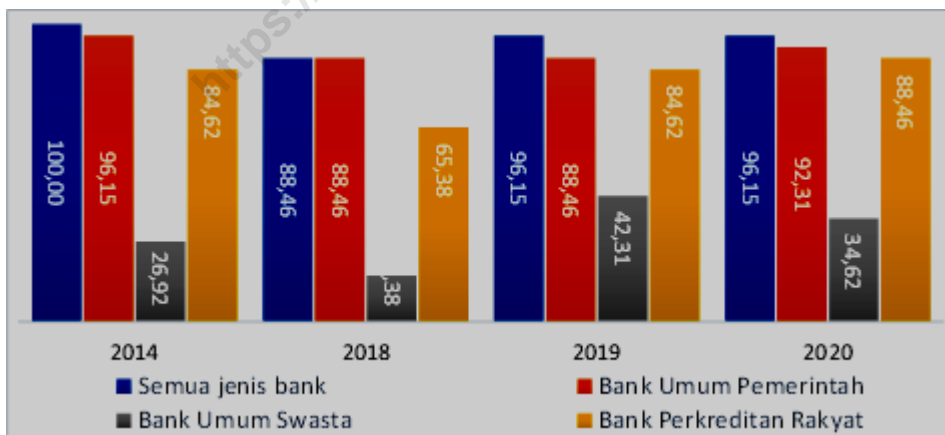
Jika ada kegiatan ekonomi maka akan ada aliran uang antara satu pihak ke pihak lainnya. Selain karena terjadi proses jual beli, baik barang maupun jasa, aliran uang ini juga dapat terjadi karena adanya aktivitas keuangan, seperti proses penyimpanan uang, peminjaman uang atau lainnya. Aktivitas keuangan seperti penyimpanan uang atau lainnya tersebut biasanya identik dengan bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).

Menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. **Bank Umum** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, **Bank Perkreditan Rakyat** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Umum mencakup Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta. Adapun bank yang termasuk Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI. Sementara itu, bank yang termasuk Bank Umum Swasta meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dan lain sebagainya.

Adanya aktivitas keuangan melalui bank ini dapat membuat perputaran uang terjadi dengan lebih stabil. Uang yang disimpan di bank tidak akan dibiarkan begitu saja di tempat penyimpanan, namun akan digunakan sebagai modal pinjaman nasabah lain ataupun untuk masuk ke pasar saham. Intinya uang tersebut akan berputar di kegiatan ekonomi yang terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Perputaran uang yang stabil ini dapat mendukung aktivitas roda perekonomian.

Gambar 14. Persentase Kecamatan yang Terdapat Bank Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Gambar 14. menunjukkan persentase kecamatan yang terdapat bank menurut jenisnya di Kabupaten Kebumen. Persentase kecamatan yang setidaknya terdapat satu jenis bank sudah mencapai 100,00 persen pada tahun 2014 dan namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 88,46 persen, lalu

mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 96,15 persen. Kondisi ini mengindikasikan sudah cukup meratanya pembangunan bank di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hal ini dikarenakan persentase kecamatan yang di dalamnya terdapat bank sudah lebih dari 50 persen bahkan mendekati 100 persen.

Persentase kecamatan yang terdapat Bank Umum Pemerintah pada tahun 2014 sebesar 96,15 persen, menurun menjadi 88,46 persen pada tahun 2018 dan 2019. Kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 92,31 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa kecenderungan sudah meratanya pembangunan Bank Umum Pemerintah di Indonesia, karena persentasenya lebih dari 50 persen.

Selanjutnya, persentase kecamatan yang terdapat Bank Umum Swasta pada tahun 2014 sebesar 26,92 persen yang menurun mencapai angka 15,38 persen pada tahun 2018 lalu meningkat mencapai angka 42,31 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 34,62 persen. Selain itu, persentase kecamatan yang terdapat Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2014 sebesar 84,62 persen yang menurun mencapai angka 65,38 persen pada tahun 2018 lalu meningkat kembali mencapai angka 84,62 persen pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 88,46 persen.

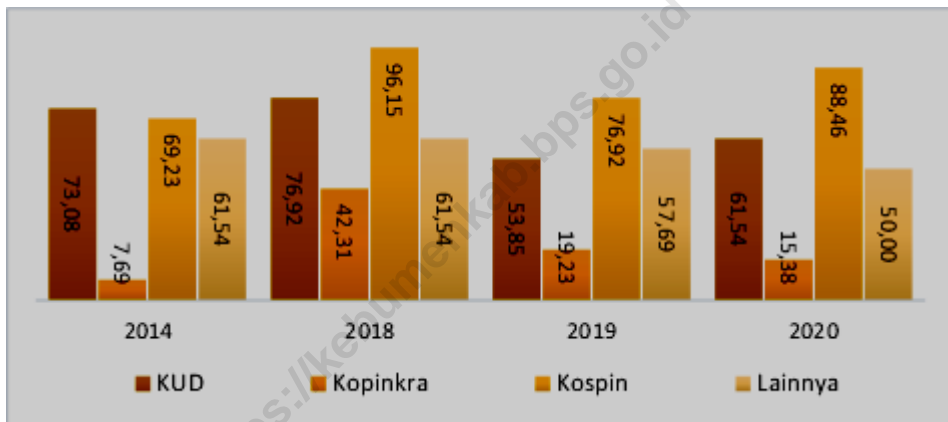
Jika dilihat dari persebarannya, bank yang memiliki sebaran yang paling merata adalah Bank Umum Pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase kecamatan yang terdapat Bank Umum Pemerintah memiliki nilai paling tinggi. Sedangkan bank yang memiliki sebaran yang paling memusat adalah bank umum swasta. Hal tersebut ditunjukkan oleh persentase kecamatan yang terdapat Bank Umum Swasta memiliki nilai paling rendah.

3.4.2. Koperasi

Gambar 15. menunjukkan perkembangan persentase kecamatan yang terdapat koperasi menurut jenisnya. Ada pun jenis koperasi yang dicakup dalam

podes adalah Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra), Koperasi Simpan Pinjam (Kospin), dan Koperasi Lainnya. Jika dilihat dari keseluruhan, persentase kecamatan yang setidaknya terdapat satu jenis koperasi menurun setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin berkurangnya pemerataan pembangunan koperasi di Kabupaten Kebumen. Hal ini diindikasikan disebabkan oleh adanya koperasi yang sudah tidak aktif karena adanya BUMDes.

Gambar 15. Persentase Kecamatan yang terdapat Koperasi Menurut Jenisnya di Kabupaten Kebumen, 2014-2020



Sumber: BPS, Podes 2014-2020

Secara umum, persentase kecamatan yang di dalamnya terdapat Koprinka cenderung mengalami kenaikan pada tahun 2018. Namun, persentasenya menurun pada tahun 2019, demikian juga pada tahun 2020. Sedangkan untuk KUD dan Kospin, pada tahun 2018 mengalami peningkatan, kemudian pada tahun 2019 menurun dan pada tahun 2020 kembali meningkat. Untuk koperasi lainnya bahkan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2014 hingga 2020. Jika dilihat dari persentasenya, penyebaran koperasi di Kabupaten Kebumen sudah cukup merata di kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hal ini dapat dilihat dari persentase kecamatan yang didalamnya setidaknya terdapat satu jenis koperasi di atas 50 persen.

Ada pun jenis koperasi yang persebarannya paling merata adalah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin). Hal ini dapat ditunjukkan dari persentase kecamatan yang terdapat Kospin lebih tinggi dibandingkan dengan jenis koperasi lainnya.

Di sisi lain, jenis koperasi yang paling tidak tersebar adalah Kopinkra, yakni persentasenya di bawah 30 persen. Jika dilihat dari pertumbuhannya, persentase kecamatan yang terdapat Kopinkra terus mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih dari pemerintah, karena untuk menunjang salah satu kebutuhan fasilitas ekonomi masyarakat.

<https://kebumenkab.bps.go.id>

BAB IV INFRASTRUKTUR MILIK DESA

2020

79,36%

Terdapat 396 desa (79,36%) dari sejumlah 449 desa di seluruh Kabupaten Kebumen telah memiliki minimal 1 unit usaha BUMDes

BUMDes



EMBUNG

5,01%

Terdapat 25 desa (5,01%) dari sejumlah 449 desa di seluruh Kabupaten Kebumen telah memiliki minimal 1 unit embung



4.1. Pembangunan Desa

Sejak dulu, desa identik dengan daerah pinggiran, persawahan, kurangnya fasilitas, dan lainnya. Namun, hal ini mungkin saja sudah berubah, karena adanya pembangunan dengan prioritas wilayah desa. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada salah satu strategi pembangunan nasional, tepatnya pada dimensi pemerataan dan kewilayahan, yang menekankan dengan prioritas wilayah desa, wilayah pinggiran, luar jawa, dan kawasan timur. Tidak hanya itu, pada NAWA CITA ketiga juga disebutkan bahwa “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Adanya prioritas pembangunan di wilayah desa ini dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah mengurangi terjadinya migrasi penduduk desa ke wilayah kota. Hal ini dapat terjadi dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa, baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Lebih jauh lagi, sarana dan prasarana ekonomi perlu dibangun di desa. Adanya sarana dan prasarana ekonomi di desa ini akan memberikan peluang usaha yang akan memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa. Jika di desa-desa sudah banyak terbuka lapangan usaha, seharusnya migrasi penduduk desa ke kota akan berkurang.

Untuk mewujudkan NAWA CITA ketiga, pemerintah telah memberikan Dana Desa untuk seluruh desa di Indonesia. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Lebih jauh, tujuan Dana Desa yaitu meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

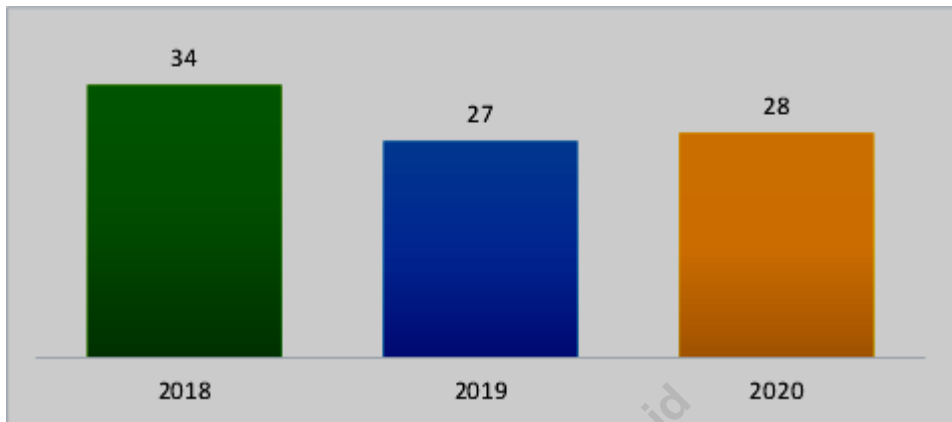
Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa ini diatur prioritas penggunaannya setiap tahun. Pada tahun 2018, prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Program dan kegiatan tersebut antara lain untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan embung desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti pembangunan Polindes, MCK, Posyandu, dan lain-lain.

4.2. Embung

Masih banyak desa yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, pembangunan di desa tetap perlu memikirkan aspek sarana dan prasarana untuk mendukung/mendorong pertanian.

Dikarenakan iklim kita yang memiliki dua musim mengakibatkan beberapa wilayah masih sering mengalami kekeringan ketika musim kemarau. Hal ini patut menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipasi hal ini agar tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Pasokan air yang sedikit, dapat sangat berpengaruh pada pertanian. Ditambah lagi, jika pertanian tersebut berkaitan dengan tanaman padi atau tanaman lainnya yang membutuhkan pasokan air yang banyak. Jika pertanian tersebut gagal karena kurangnya pasokan air, maka kemungkinan dapat berdampak pada hasil produksi padi yang menurun, dan dampak lainnya. Melihat kondisi yang demikian, sebenarnya pembangunan embung di desa relatif efektif untuk mengatasi hal tersebut.

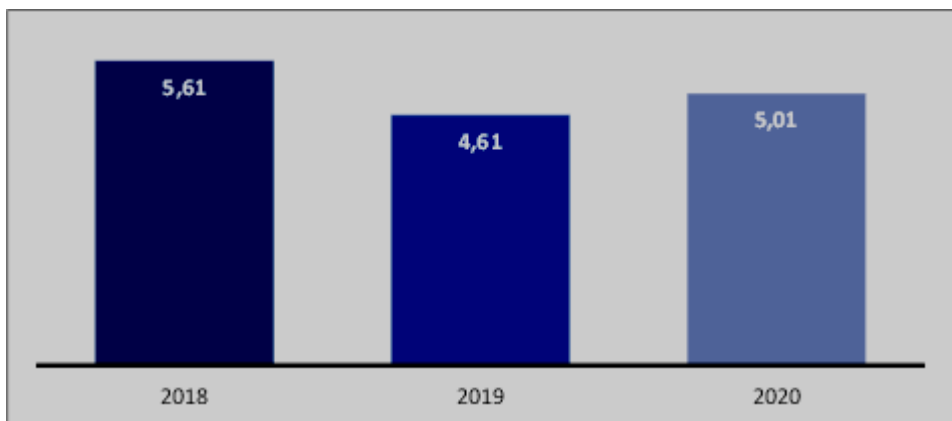
Gambar 16. Perkembangan Jumlah Embung Desa di Kabupaten Kebumen, 2018-2020



Sumber: BPS, Podes 2018-2020

Perkembangan jumlah embung di desa pada tahun 2020 mengalami penambahan 1 buah embung dibanding tahun 2019, yaitu dari 27 embung desa di tahun 2019 naik menjadi 28 di tahun 2020. Jika dilihat dari desa yang terdapat minimal satu embung di Kabupaten Kebumen, maka terdapat sebesar 5,01 persen (25 desa) dari total sebanyak 449 desa di tahun 2020. Persentase ini meningkat dibandingkan nilai yang ada pada tahun 2019 yang juga sebesar 4,61 persen desa yang terdapat minimal satu embung di desa.

Gambar 17. Perkembangan Persentase Desa yang Terdapat Minimal Satu Embung di Kabupaten Kebumen, 2018-2020



Sumber: BPS, Podes 2018-2020

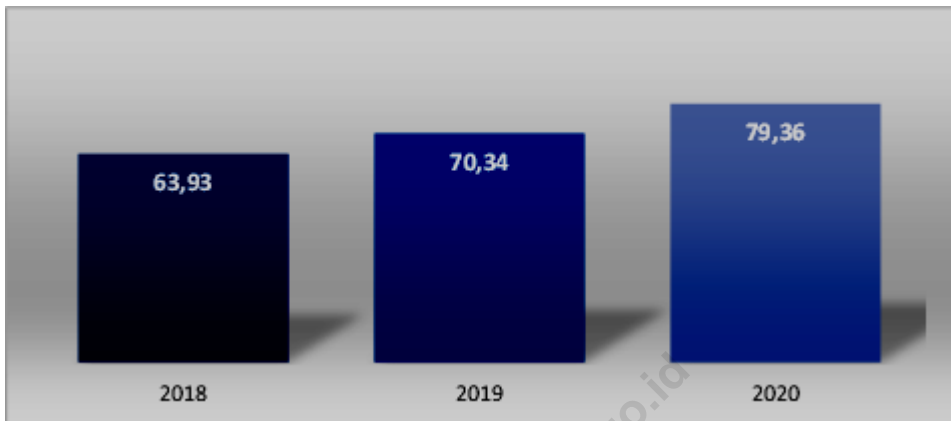
4.3. Badan Usaha Milik Desa

Salah satu prioritas pembangunan di desa selain embung adalah Badan Usaha Milik Desa, atau biasa disebut dengan istilah BUMDes. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yaitu berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antardesa (Permendes PD TT RI No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes).

Salah satu harapan pendirian BUMDes di suatu desa adalah sebagai alat untuk dapat meningkatkan kemandirian desa, khususnya dalam bidang ekonomi. Hal ini dimaksudkan dari adanya keuntungan hasil usaha yang dijalankan BUMDes tersebut akan masuk ke kantong desa sebagai Penghasilan Asli Desa (PADes). Semakin banyak PADes, maka semakin besar peluang desa untuk dapat membiayai sendiri pembangunan dan kebutuhan desanya, tanpa perlu bergantung pada bantuan pemerintah pusat atau pihak lain.

Unit usaha BUMDes meliputi beragam bentuk, antara lain koperasi, toko, usaha persewaan tenda, dan usaha lainnya. Berdasarkan data *Updating Podes* tahun 2020 seperti terlihat pada gambar 18, terdapat 396 desa yang terdapat minimal satu unit usaha BUMDes. Angka ini setara dengan 79,36 persen dari total desa yang ada di Kabupaten Kebumen. Terjadi kenaikan sebesar 12,82 persen dari persentase jumlah desa yang terdapat minimal satu unit usaha BUMDes pada tahun 2019. Kenaikan ini mengindikasikan dalam waktu satu tahun terakhir terdapat pengembangan sebanyak 45 desa baru yang terdapat minimal satu unit usaha BUMDes.

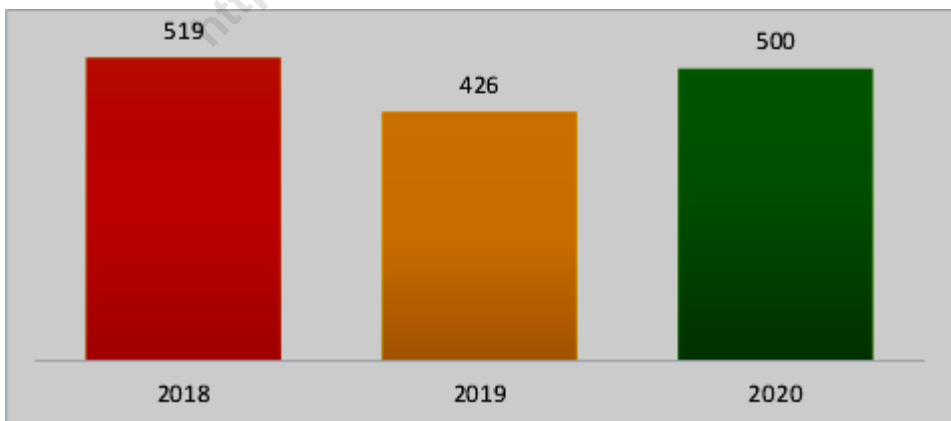
Gambar 18. Perkembangan Persentase Desa yang Terdapat Minimal Satu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kebumen 2018-2020



Sumber: BPS, Podes 2018-2020

Jika dilihat dari jumlah unit usaha BUMDes berdasarkan Gambar 19, terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan sekitar 17,37 persen pada sisi jumlah unit usaha BUMDes. Dari 426 unit usaha BUMDes pada tahun 2019 menjadi 500 unit usaha.

Gambar 19. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kebumen, 2018-2020



Sumber: BPS, Podes 2018-2020

DAFTAR PUSTAKA

- Klaus Schwab, World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019.*
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024: Buku I Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.*
- Badan Pusat Statistik. 2015. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 29 Oktober 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1635. Jakarta.*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. 29 September 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. 5 Januari 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No 2. Jakarta.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 3 Juni 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.*
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. 8 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3. Jakarta.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. 5 Februari 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33. Jakarta.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. 16 Agustus 2016. Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6. Kebumen*
- <http://sdgsindonesia.or.id/>. 12 April 2021. 10.10. Jakarta.

LAMPIRAN

<https://www.jemberkab.bps.go.id>

Lampiran 1. Banyaknya Wilayah Administrasi Setingkat Desa Menurut Status Pemerintahan, 2020

Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	18	-	18
Buayan	20	-	20
Puring	23	-	23
Petanahan	21	-	21
Klirong	24	-	24
Buluspesantren	21	-	21
Ambal	32	-	32
Mirit	22	-	22
Bonorowo	11	-	11
Prebun	13	-	13
Padureso	9	-	9
Kutowinangun	19	-	19
Alian	16	-	16
Poncowarno	11	-	11
Kebumen	24	5	29
Pejagoan	13	-	13
Sruweng	21	-	21
Adimulyo	23	-	23
Kuwarasan	22	-	22
Rowokele	11	-	11
Sempor	16	-	16
Gombong	12	2	14
Karanganyar	7	4	11
Karanggayam	19	-	19
Sadang	7	-	7
Karangsambung	14	-	14
Kabupaten Kebumen	449	11	460

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 2. Banyaknya SD/MI Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	SD/MI		Jumlah SD/MI
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	29	15	44
Buayan	33	5	38
Puring	38	3	41
Petanahan	32	3	35
Klirong	36	2	38
Buluspesantren	32	8	40
Ambal	36	4	40
Mirit	32	4	36
Bonorowo	20	2	22
Prembun	23	4	27
Padureso	12	2	14
Kutowinangun	30	5	35
Alian	33	10	43
Poncowarno	12	3	15
Kebumen	60	14	74
Pejagoan	28	10	38
Sruweng	35	6	41
Adimulyo	27	2	29
Kuwarasan	30	7	37
Rowokele	31	6	37
Sempor	39	4	43
Gombong	24	8	32
Karanganyar	27	1	28
Karanggayam	37	3	40
Sadang	13	3	16
Karangsambung	29	4	33
Kabupaten Kebumen	778	138	916

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 3. Banyaknya SMP/MTs Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	SMP/MTs		Jumlah SMP/MTs
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	3	13	16
Buayan	2	4	6
Puring	3	2	5
Petanahan	1	8	9
Klirong	2	8	10
Buluspesantren	2	5	7
Ambal	2	5	7
Mirit	2	4	6
Bonorowo	1	2	3
Prembun	3	5	8
Padureso	1	2	3
Kutowinangun	4	5	9
Alian	2	10	12
Poncowarno	2	1	3
Kebumen	10	18	28
Pejagoan	2	5	7
Sruweng	2	6	8
Adimulyo	2	3	5
Kuwarasan	1	5	6
Rowokele	3	4	7
Sempor	3	4	7
Gombong	5	3	8
Karanganyar	3	4	7
Karanggayam	2	8	10
Sadang	1	2	3
Karangsambung	4	4	8
Kabupaten Kebumen	68	140	208

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 4. Banyaknya SMA/MA Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	SMA/MA		Jumlah SMA/MA
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	1	2	3
Buayan	-	-	-
Puring	-	1	1
Petanahan	1	4	5
Klirong	1	1	2
Buluspesantren	1	-	1
Ambal	-	1	1
Mirit	1	-	1
Bonorowo	-	-	-
Prembun	1	3	4
Padureso	-	1	1
Kutowinangun	2	1	3
Alian	-	-	-
Poncowarno	-	-	-
Kebumen	4	5	9
Pejagoan	1	1	2
Sruweng	-	2	2
Adimulyo	-	-	-
Kuwarasan	-	3	3
Rowokele	1	1	2
Sempor	-	-	-
Gombong	2	3	5
Karanganyar	1	-	1
Karanggayam	-	1	1
Sadang	-	1	1
Karangsambung	1	-	1
Kabupaten Kebumen	18	31	49

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 5. Banyaknya SMK Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	SMK		Jumlah SMK
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	-	2	2
Buayan	-	1	1
Puring	1	-	1
Petanahan	-	2	2
Klirong	-	2	2
Buluspesantren	-	2	2
Ambal	1	1	2
Mirit	-	2	2
Bonorowo	-	1	1
Prembun	-	2	2
Padureso	-	1	1
Kutowinangun	-	3	3
Alian	1	2	3
Poncowarno	-	-	-
Kebumen	2	17	19
Pejagoan	-	-	-
Sruweng	-	1	1
Adimulyo	-	-	-
Kuwarasan	-	1	1
Rowokele	-	2	2
Sempor	-	1	1
Gombong	1	7	8
Karanganyar	1	7	8
Karanggayam	1	1	2
Sadang	-	1	1
Karangsambung	-	-	-
Kabupaten Kebumen	8	59	67

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 6. Banyaknya Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Akademi/Perguruan Tinggi		Jumlah Akademi/Perguruan Tinggi
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	-	1	1
Buayan	-	-	-
Puring	-	-	-
Petanahan	-	-	-
Klirong	-	-	-
Buluspesantren	-	-	-
Ambal	-	-	-
Mirit	-	-	-
Bonorowo	-	-	-
Prembun	-	-	-
Padureso	-	-	-
Kutowinangun	-	-	-
Alian	-	-	-
Poncowarno	-	-	-
Kebumen	-	7	7
Pejagoan	-	1	1
Sruweng	-	-	-
Adimulyo	-	-	-
Kuwarasan	-	-	-
Rowokele	-	-	-
Sempor	-	-	-
Gombong	-	1	1
Karanganyar	-	-	-
Karanggayam	-	-	-
Sadang	-	-	-
Karangsambung	-	-	-
Kabupaten Kebumen	-	10	10

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 7. Banyaknya Rumah Sakit dan Rumah Sakit Bersalin Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin
(1)	(2)	(3)
Ayah	-	-
Buayan	1	-
Puring	-	-
Petanahan	1	-
Klirong	-	-
Buluspesantren	-	-
Ambal	-	-
Mirit	-	-
Bonorowo	-	-
Prembun	1	-
Padureso	-	-
Kutowinangun	1	-
Alian	-	-
Poncowarno	-	-
Kebumen	3	-
Pejagoan	-	-
Sruweng	1	-
Adimulyo	-	-
Kuwarasan	1	-
Rowokele	-	-
Sempor	-	-
Gombong	2	-
Karanganyar	-	-
Karanggayam	-	-
Sadang	-	-
Karangsambung	-	-
Kabupaten Kebumen	11	-

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 8. Banyaknya Puskesmas dengan Rawat Inap dan Tanpa Rawat Inap Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Puskesmas dengan Rawat Inap	Puskesmas Tanpa Rawat Inap
(1)	(2)	(3)
Ayah	1	1
Buayan	1	1
Puring	-	1
Petanahan	1	-
Klirong	-	2
Buluspesantren	-	2
Ambal	1	1
Mirit	1	-
Bonorowo	-	1
Prebun	-	1
Padureso	1	-
Kutowinangun	1	-
Alian	1	-
Poncowarno	-	1
Kebumen	-	3
Pejagoan	1	-
Sruweng	-	1
Adimulyo	-	1
Kuwarasan	-	1
Rowokele	-	1
Sempor	-	2
Gombong	1	1
Karanganyar	1	-
Karanggayam	-	2
Sadang	-	1
Karangsambung	1	-
Kabupaten Kebumen	12	24

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 9. Banyaknya Pasar Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Pasar dengan Bangunan Permanen	Pasar dengan Bangunan Semi Permanen	Pasar Tanpa Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	6	7	2
Buayan	4	11	2
Puring	4	3	2
Petanahan	3	4	6
Klirong	3	4	1
Buluspesantren	2	3	10
Ambal	-	2	6
Mirit	1	2	8
Bonorowo	2	1	3
Prembun	8	2	3
Padureso	12	2	2
Kutowinangun	8	2	3
Alian	8	5	1
Poncowarno	3	1	2
Kebumen	7	7	4
Pejagoan	1	3	5
Sruweng	3	5	2
Adimulyo	1	4	3
Kuwarasan	4	3	1
Rowokele	1	1	3
Sempor	2	1	1
Gombong	15	2	-
Karanganyar	5	4	-
Karanggayam	3	4	2
Sadang	3	1	2
Karangsambung	1	-	9
Kabupaten Kebumen	110	84	83

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 10. Banyaknya Hotel dan Penginapan Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Hotel	Penginapan
(1)	(2)	(3)
Ayah	4	57
Buayan	1	1
Puring	1	1
Petanahan	-	-
Klirong	-	-
Buluspesantren	-	-
Ambal	-	-
Mirit	-	-
Bonorowo	-	-
Prembun	-	1
Padureso	-	-
Kutowinangun	-	-
Alian	-	1
Poncowarno	-	-
Kebumen	17	3
Pejagoan	-	4
Sruweng	-	-
Adimulyo	-	-
Kuwarasan	-	-
Rowokele	-	-
Sempor	3	-
Gombong	6	2
Karanganyar	2	-
Karanggayam	-	-
Sadang	-	-
Karangsambung	-	-
Kabupaten Kebumen	34	70

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 11. Banyaknya Bank Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat
(1)	(2)	(3)	(4)
Ayah	3	-	1
Buayan	2	-	3
Puring	2	1	1
Petanahan	3	-	2
Klirong	2	-	2
Buluspesantren	1	-	1
Ambal	2	-	1
Mirit	1	-	1
Bonorowo	1	-	-
Prembun	2	3	4
Padureso	1	-	1
Kutowinangun	3	-	2
Alian	2	1	2
Poncowarno	-	1	-
Kebumen	11	9	5
Pejagoan	1	-	1
Sruweng	2	1	1
Adimulyo	2	-	1
Kuwarasan	2	-	1
Rowokele	1	-	1
Sempor	1	3	1
Gombong	7	4	5
Karanganyar	3	1	1
Karanggayam	1	-	2
Sadang	-	-	-
Karangsambung	2	-	1
Kabupaten Kebumen	58	24	41

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 12. Banyaknya Koperasi Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Koperasi Unit Desa (KUD)	Kopinkra/ Usaha Mikro	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	Koperasi Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ayah	-	-	4	5
Buayan	2	-	6	5
Puring	1	-	3	-
Petanahan	1	-	3	9
Klirong	2	-	2	2
Buluspesantren	1	1	6	1
Ambal	1	-	6	1
Mirit	-	-	1	-
Bonorowo	2	-	-	-
Prebun	-	-	2	1
Padureso	-	-	3	1
Kutowinangun	1	-	7	1
Alian	1	-	2	-
Poncowarno	-	-	1	1
Kebumen	-	3	26	-
Pejagoan	5	-	5	-
Sruweng	1	-	1	3
Adimulyo	1	-	1	1
Kuwarasan	2	-	4	-
Rowokele	-	2	3	-
Sempor	-	-	2	-
Gombong	1	1	21	-
Karanganyar	-	-	1	-
Karanggayam	1	-	1	2
Sadang	-	-	-	-
Karangsambung	1	-	-	-
Kabupaten Kebumen	24	7	111	33

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 13. Banyaknya Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Unit Usaha BUMDes
(1)	(2)
Ayah	27
Buayan	18
Puring	24
Petanahan	24
Klirong	30
Buluspesantren	23
Ambal	37
Mirit	17
Bonorowo	11
Prembun	12
Padureso	9
Kutowinangun	23
Alian	15
Poncowarno	12
Kebumen	23
Pejagoan	12
Sruweng	19
Adimulyo	31
Kuwarasan	25
Rowokele	15
Sempor	25
Gombong	8
Karanganyar	7
Karanggayam	31
Sadang	7
Karangsambung	15
Kabupaten Kebumen	500

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 14. Banyaknya Embung di Desa Menurut Provinsi, 2020

Kecamatan	Embung
(1)	(2)
Ayah	4
Buayan	-
Puring	-
Petanahan	-
Klirong	-
Buluspesantren	-
Ambal	-
Mirit	-
Bonorowo	-
Prembun	-
Padureso	-
Kutowinangun	1
Alian	-
Poncowarno	-
Kebumen	-
Pejagoan	-
Sruweng	2
Adimulyo	2
Kuwarasan	3
Rowokele	4
Sempor	3
Gombong	-
Karanganyar	-
Karangayam	2
Sadang	4
Karangsambung	3
Kabupaten Kebumen	28

Sumber : Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020

Lampiran 15. Kuesioner Pemutakhiran Data Perkembangan Desa 2020 (PODES2020.UPDATING)



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA 2020**

PODES2020.UPDATING

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			<input type="text"/>
102	Kabupaten/(Kota *)			<input type="text"/>
103	Kecamatan			<input type="text"/>
104	Desa/(Kelurahan *)			<input type="text"/>
105	Status Daerah	Perkotaan - 1	Perdesaan - 2	<input type="checkbox"/>
106	SK pembentukan/pengesahan desa/kelurahan:			
	Permendagri	- 1	SK Gubernur/Bupati	- 4
	Perifa Provinsi	- 2	Lainnya..... (ditiskan)	- 5
	Perifa Kabupaten	- 3		
107	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan:			
	a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan	Ya - 3	Tidak - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Ada pemerintah desa/kelurahan	Ya - 5	Tidak - 6	<input type="checkbox"/>
	<i>Jika R107 a, b atau c ada yang berkode 2,4, atau 6, maka lanjutkan ke R201 sampai R206 kemudian STOP</i>			
108	Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan:			
	a. Alamat lengkap			
	b. Nomor telepon	<input type="text"/>		
	c. Alamat e-mail			
			Kode Pos :	<input type="text"/>
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah			204 Nama Pengawas/Pemeriksa
202	NIP/NIM	<input type="text"/>		205 NIP/NIM
203	Tanggal Pencacahan	<input type="text"/>		206 Tanggal Pemeriksaan
207	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN				
301	Status pemerintahan:			
	Desa - 1	Kelurahan - 2	UPD/SPT - 3	Nagari - 4
302	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan:			
	Ada - 1	Tidak ada - 2	→ R303	
	h. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2019:			
	<input type="text"/>			
303	Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur:			
	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	

*] Caret yang tidak sesuai

IV. KEPENDUDUKAN & KEWILAYAHAN										
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2020:									
	a. Jumlah penduduk laki-laki							orang		
	b. Jumlah penduduk perempuan							orang		
	c. Jumlah keluarga							keluarga		
402	d. Jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan)									
							keluarga			
Luas wilayah desa/kelurahan : km ² (1 Ha = 0,01 km ²)										
V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN										
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik :									
	1. PLN (Perusahaan Listrik Negara)								keluarga	
	2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseroangan)								keluarga	
502	b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik									
							keluarga			
502	a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan:									
	Ada, sebagian besar - 1			Ada, sebagian kecil - 2			Tidak ada - 3 → R503			
	<input type="checkbox"/>									
503	b. Jika ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan (R502a berkode 1 atau 2), jenis penerangan:									
	Listrik diambatkan oleh pemerintah - 1			Listrik diusahakan oleh non pemerintah - 2			Non listrik - 3			
	<input type="checkbox"/>									
503	a. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga:									
	1. Gas kota	Ya	- 1	Tidak	- 2	1.				
	2. LPG 3 kg	Ya	- 3	Tidak	- 4	2.				
	3. LPG lebih dari 3 kg	Ya	- 5	Tidak	- 6	3.				
	4. Minyak tanah	Ya	- 7	Tidak	- 8	4.				
	5. Kayu bakar	Ya	- 1	Tidak	- 2	5.				
	6. Lainnya (tuliskan, misalnya: batu bara, arang, dll.)	Ya	- 3	Tidak	- 4	6.				
	b. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga: (Pilih salah satu kode pada R503a yang dijawab "Ya")									
	<input type="checkbox"/>									
	504	a. Tempat buang sampah keluarga:								
1. Tempat sampah, kemudian diangkut		Ya	- 1	Tidak	- 2	1.				
2. Dalam lubang atau dibakar		Ya	- 3	Tidak	- 4	2.				
3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut		Ya	- 5	Tidak	- 6	3.				
4. Drainase (got/selokan)		Ya	- 7	Tidak	- 8	4.				
5. Lainnya (tuliskan)		Ya	- 1	Tidak	- 2	5.				
b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab "Ya"):										
<input type="checkbox"/>										
c. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS):										
Ada, digunakan - 1			Ada, tidak digunakan - 2			Tidak ada - 3				
<input type="checkbox"/>										
505	Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>									
506	Kegiatan pengolahan sampah: pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle) selama setahun terakhir Ada, sebagian warga terlihat - 1 Ada, warga tidak terlihat - 2 Tidak ada kegiatan - 3 <input type="checkbox"/>									
507	a. Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga di desa/kelurahan:									
	Jamban sendiri - 1		Jamban umum - 3							
	Jamban bersama - 2		Bukan jamban - 4 → R508							
	<input type="checkbox"/>									
508	b. Tempat pembuangan alshir tinja sebagian besar keluarga:									
	Tangki/instalasi pengelolaan air limbah - 1		Lubang tanah - 3							
	Sawah/tegalan/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/tebing - 2		Lainnya - 4							
	<input type="checkbox"/>									
508	Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga di desa/kelurahan berasal dari:									
	Air kemasan bermerk - 1		Sumur - 6							
	Air isi ulang - 2		Mata air - 7							
	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) - 3		Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan - 8							
	Ledeng tanpa meteran - 4		Air hujan - 9							
	Sumur bor atau pompa - 5		Lainnya (tuliskan) - 10							
	<input type="checkbox"/>									
509	Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari:									
	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) - 1		Mata air - 5							
	Ledeng tanpa meteran - 2		Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan - 6							
	Sumur bor atau pompa - 3		Air hujan - 7							
	Sumur - 4		Lainnya (tuliskan) - 8							
<input type="checkbox"/>										
510	Keberadaan sungai di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>									
511	Jumlah embung di desa/kelurahan: <input type="checkbox"/> buah									
512	a. Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R601 <input type="checkbox"/>									
	b. Jika ada permukiman kumuh:									
	1. Jumlah lokasi							lokasi		
	2. Jumlah bangunan							unit		
3. Jumlah keluarga (jika tidak boleh lebih dari isian R601c)										
						keluarga				

VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN				
601	Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan:			
	Jenis/jenjang pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan		Jika tidak ada lembaga pendidikan di desa/kelurahan (kolom (2) dan kolom (3) terisi 0), jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terdekat
		Negeri	Swasta	
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. TK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. RA/BA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. SD	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. MI	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. SMP	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. MTs	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. SMA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. MA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. SMK	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	k. Akademi/perguruan tinggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Kode kolom (5):	Sangat mudah - 2	Mudah - 2	Sulit - 3
				Sangat sulit - 4
602	Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) : Ada -1 Tidak ada -2 <input type="checkbox"/>			
603	Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan			
	Sarana kesehatan	Jumlah	Jika tidak ada sarana kesehatan di desa/kelurahan [kolom (2) berkode 0], jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Rumah sakit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Rumah sakit bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Puskesmas dengan rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Puskesmas tanpa rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Puskesmas pembantu	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Poliklinik/balai pengobatan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Tempat praktik dokter	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Rumah bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Tempat praktek bidan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Puskesmasdes (pos kesehatan desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	k. Polindes (punduk bersalin desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	l. Apotek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	m. Toko khusus obat (jamu)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	n. Posyandu menurut kegiatan/pelayanan selama setahun terakhir	<input type="text"/>		
	1. Posyandu yang melakukan kegiatan penyuluhan/pendidikan	<input type="text"/>		
	2. Posyandu yang memberikan makanan/minuman tambahan	<input type="text"/>		
	3. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali	<input type="text"/>		
	4. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih	<input type="text"/>		
	Kode kolom (4):	Sangat mudah - 1	Mudah - 2	Sulit - 3
				Sangat sulit - 4

604	Jumlah warga penderita gizi buruk (marasmus dan kwashiorkor) pada tahun 2019	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	orang
605	Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir Jenis KLB/wabah penyakit (KLB: timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, ditetapkan oleh pemerintah)	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada KLB atau wabah, (kolom (2) berkode 1) Jumlah penderita Jumlah penderita yang meninggal		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Muntaber/diare	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Demam berdarah	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Campak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Malaria	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Flu burung/SARS	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Hepatitis E	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Difteri	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Corona/COVID-19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Lainnya..... (tuliskan, misalnya: chikungunya, leptospirosis, kolera, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VII. OLAHRAGA DAN HIBURAN					
701	Keberhasilan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga di desa/kelurahan :	Fasilitas/lapangan olahraga Kelompok kegiatan			
	Jenis olahraga	Ada baik - 1 Ada, rusak sedang - 2	Rusak parah - 3 Tidak ada - 4	Ada - 1 Tidak ada - 2	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Sepak bola	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Bola voli	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Bulu tangkis	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Bola basket	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Tenis lapangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Tenis meja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Futsal	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Renang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Hiyad	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	k. Pusat kebugaran (senam, fitness, aerobik, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	l. Lainnya.....(tuliskan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
702	Keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke yang masih berfungsi: Ada - 1 Tidak ada - 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
703	Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka/alun-alun, taman, dll.): Ada, dikelola - 1 Ada, tidak dikelola - 2 Tidak ada - 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VIII. ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI					
801	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan :				
	a. Jalur lintas dari/ke desa/kelurahan melalui : Darat - 1 Air - 2 → RB01c Darat dan air - 3 Udara - 4 → RB01c	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Jika lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air (RB01a berkode 1 atau 3): 1. Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas : Aspal/beton - 1 Tanah - 3 Diperkeras (kerikil, batu, dll.) - 2 Lainnya(tuliskan) - 4 (tuliskan, misalnya: jalan setapak, kayu/papan, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih : Sepanjang tahun - 1 Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.) - 2 Selama musim kemarau - 3 Tidak dapat dilalui sepanjang tahun - 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan :				
	1. Keberadaan angkutan umum : Ada, dengan trayek tetap - 1 Ada, tanpa trayek tetap - 2 Tidak ada angkutan umum - 3 → RB02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2. Operasional angkutan umum yang utama : Setiap hari - 1 Tidak setiap hari - 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3. Jam operasi angkutan umum yang utama : Siang dan malam hari - 1 Hanya siang hari - 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

002	Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota:						
	Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan [kode]	Jika ada angkutan umum (kode 2) berkode 1, 3, 5 atau 7)		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam:menit)	Biaya transportasi (000 Rupiah)
Jenis angkutan umum [kode]			Angkutan umum yang utama [kode]				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	Kantor camat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b.	Kantor bupati/walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kode kolom (2). pilihan boleh lebih dari satu kode: Angkutan umum - 1 Kendaraan pribadi - 2 Jalan kaki, sepeda, dll - 4		Kode kolom (3). pilihan boleh lebih dari satu kode: Ojek sepeda motor - 1 Mekarmotor bermotor roda 3 atau lebih - 2 Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 4 Pesawat terbang - 8 Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 16		Kode kolom (4): Ojek sepeda motor - 1 Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2 Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 3 Pesawat terbang - 4 Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 5			
003	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel: <input type="text"/> keluarga						
	b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone: Sebagian besar warga - 1 Sebagian kecil warga - 2 Tidak ada - 3						<input type="checkbox"/>
004	Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2						<input type="checkbox"/>
005	Keberadaan menara telepon seluler, sinyal telepon dan sinyal internet di desa/kelurahan						
	a. Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS): <input type="text"/> buah						
	b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan: <input type="text"/> jenis						
	c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan: Sinyal sangat kuat - 1 Sinyal kuat - 2 Sinyal lemah - 3 Tidak ada sinyal - 4 → R806						<input type="checkbox"/>
	d. Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan: 4G/LTE - 1 3G/H/H+/EVDO - 2 2.5G/E/GPRS - 3 Tidak ada sinyal internet - 4						<input type="checkbox"/>
006	a. Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa/lurah: Digunakan - 1 Jarang digunakan - 2 Tidak digunakan - 3 Tidak ada - 4						<input type="checkbox"/>
	b. Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah: Berfungsi - 1 Jarang berfungsi - 2 Tidak berfungsi - 3 Tidak ada - 4						<input type="checkbox"/>
007	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos: Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4						<input type="checkbox"/>
	b. Layanan pos keliling: Ada - 1 Tidak ada - 2						<input type="checkbox"/>
	c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta: Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4						<input type="checkbox"/>
IX. EKONOMI							
901	Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut bahan baku utama:						Jumlah
	a. Industri barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll.)						<input type="text"/> unit
	b. Industri barang dari kayu (meja, kursi, lemari, dll.)						<input type="text"/> unit
	c. Industri barang dari logam mulia atau bahan logam (perahot dan perhiasan dari logam, dll.)						<input type="text"/> unit
	d. Industri barang dari kain/tenun (kerajinan tenun, konveksi, dll.)						<input type="text"/> unit
	e. Industri gerabah/keramik/batu (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dll.)						<input type="text"/> unit
	f. Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bambu, rumput, pandan, dll. (tikar, tas, hiasan dinding, dan produk lainnya).						<input type="text"/> unit
	g. Industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dll.)						<input type="text"/> unit
	h. Industri lainnya (tuliskan)						<input type="text"/> unit

902	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling): <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>			
	b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling): <i>Ada - 3 Tidak ada - 4</i> <input type="checkbox"/>			
903	Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/kelurahan			
	Jenis sarana lembaga keuangan	Jumlah	Jika tidak ada [kolom (2) terisi 0], jarak dan akses ke sarana/lembaga keuangan terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Bank Umum Pemerintah {BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN}	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Bank Umum Swasta {BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll}	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	Kode kolom (4): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4			
904	Jumlah koperasi di desa/kelurahan yang masih aktif:			
	a. Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi:	<input type="text"/>	unit	
	b. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinira)/Usaha mikro	<input type="text"/>	unit	
	c. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	<input type="text"/>	unit	
	d. Koperasi lainnya	<input type="text"/>	unit	
905	Keberadaan salon kecantikan : <i>Ada -1 Tidak ada -2</i> <input type="checkbox"/>			
906	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan			
	Jenis sarana dan prasarana ekonomi	Jumlah	Jika tidak ada [kolom (2) terisi 0], jarak dan akses ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat:	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	f. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Warung/wedat makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	Kode kolom (4): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4			
X. SOSIAL DAN KEAMANAN				
1001	Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir: <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3</i> <input type="checkbox"/>			

1002	a. Kejadian perkelahian massal di desa/keurahan selama setahun terakhir : <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> → R1004 <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, jumlah perkelahian massal yang terjadi <input type="text"/>				
	c. Keberadaan korban:				
	1 Meninggal <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>				
	2 Luka-luka <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>				
	d. Penyebab perkelahian: (Pilihan boleh lebih dari satu)				
	<i>Barta - 1 Asmaru - 4 Keramahan (jokoh raja, haturan, dll) - 16</i>				
	<i>Kekuasaan - 2 Adologi/Aspercuayan - 8 Ketidaksiasaan atas kebijakan/pelayanan - 32</i>				
		<i>Lainnya - 64</i> <input type="text"/>			
1003	Upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh: (Pilihan boleh lebih dari satu)				
	<i>Aparat kesamanan - 1 Takwah masyarakat - 4 Lainnya - 16</i>				
	<i>Aparat pemerintah - 2 Takwah agama - 8 Tidak ada - 32</i>	<input type="text"/>			
1004	Tindak kejahatan yang terjadi di desa/keurahan selama setahun terakhir :				
Kode	Jenis tindak kejahatan	Kejadian <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	Jika ada tindak kejahatan (<i>kolom (3) berkode 1</i>), kecenderungan tindak kejahatan dibanding setahun yang lalu <i>Menurun - 1 Sama saja - 2 Meningkat - 3</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)		
01	Perkosaan/kejahatan terhadap kesucialan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
02	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
03	Perdagangan orang (trafficking)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
04	Korupsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
1005	Kegiatan warga desa/keurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/keurahan selama setahun terakhir :				
	a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	<i>Ya - 1 Tidak - 2</i>	<input type="checkbox"/>		
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	<i>Ya - 3 Tidak - 4</i>	<input type="checkbox"/>		
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	<i>Ya - 5 Tidak - 6</i>	<input type="checkbox"/>		
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	<i>Ya - 7 Tidak - 8</i>	<input type="checkbox"/>		
	e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	<i>Ya - 1 Tidak - 2</i>	<input type="checkbox"/>		
1006	Jumlah tempat ibadah di desa/keurahan:				
	Jenis tempat ibadah	Jumlah	Jenis tempat ibadah		
	(1)	(2)	(1)		
	a. Masjid	<input type="text"/>	f. Pura		
	b. Surau/Langgar/Musala	<input type="text"/>	g. Wihara		
	c. Gereja Kristen	<input type="text"/>	h. Kolonteng		
	d. Gereja Katolik	<input type="text"/>	i. Lainnya,		
	e. Kapel	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
XI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM					
1101	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 (Januari sampai Mei):				
	Kejadian <i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i>	Jika ada kejadian/bencana alam (<i>kolom (2) berkode 1</i>)			
		2019		2020 (Januari-Mei)	
		Banyak kejadian	Korban jiwa	Banyak kejadian	Korban jiwa
	(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
	a. Tanah longsor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Banjir	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Banjir bandang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Gempa bumi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Tsunami	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Gelombang pasang laut	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Angin puyuh/puting belulang/topan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Gunung meletus	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Kebakaran hutan dan lahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Kekeringan (lahan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1102	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:				
	a. Sistem peringatan dini bencana alam	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
	b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	Bukan wilayah potensi tsunami - 0	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>	
	d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>	
	e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
XII. ASET DESA (Ditanyakan jika Status Pemerintahan (R301) berkode 1 atau 4 (Desa atau Nagari))					
1201	Kepemilikan aset desa:				
	a. Tanah kas desa/ulayat	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
	b. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.)	Ada, digunakan - 1	Ada, tidak digunakan - 2	Tidak ada - 3	<input type="checkbox"/>
	c. Aset desa lainnya (tulislah, misalnya: pemondokan umum, lapangan olah raga, dll.)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
1202	Jumlah unit usaha BUMDes:	<input type="checkbox"/> unit			
1203	Jumlah pasar desa (pasar hewan, pekelangan ikan, pekelangan hasil pertanian, dll.)	<input type="checkbox"/> unit			
1204	Jumlah tambahan perahu	<input type="checkbox"/> unit			
XIII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN					
1301	Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah:				
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)		
			Umur (tahun)	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamalkan [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	*] Kode kolom (5):	Tidak pernah sekolah - 1	SMP/Sederajat - 4	Diploma IV/ST - 7	
		Tidak tamat SD/Sederajat - 2	SML/Sederajat - 5	S2 - 8	
		Tamat SD/Sederajat - 3	Akademi/DIII - 6	S3 - 9	
1302	Jumlah aparatur pemerintahan:				
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, kaur perencanaan, dll)	<input type="checkbox"/>			
	b. Pelaksana Teknis (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dll)	<input type="checkbox"/>			
XIV. CATATAN					

CATATAN TEKNIS

1. **Jenjang Pendidikan Formal** terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.
 - a. **Pendidikan Dasar** berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. **Pendidikan Menengah** berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat.
 - c. **Pendidikan Tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
2. **Rumah Sakit** adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
3. **Rumah Sakit Bersalin** adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.
4. **Puskesmas** adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian

kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan atau rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari dua sampai tiga puskesmas di dalam satu kecamatan. Puskesmas dibedakan antara puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap dan tidak.

5. **Pasar** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar dapat menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar dapat terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.
 - a. **Pasar dengan bangunan permanen** adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai, atap, dan dinding permanen.
 - b. **Pasar dengan bangunan semi permanen** adalah pasar pada bangunan tetap yang memiliki lantai dan atap, tetapi tanpa dinding. Bangunan pada pasar tradisional yang mencakup bangunan permanen dan semi permanen dikategorikan sebagai pasar dengan bangunan permanen.
 - c. **Pasar tanpa bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan.
6. **Hotel** adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, dan lain-lain) bagi masyarakat umum secara dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.
7. **Penginapan** (hostel/motel/losmen/ wisma) adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
8. **Bank Umum** adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat

dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank Umum mencakup bank umum pemerintah dan swasta

9. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)** adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.
10. **Koperasi Unit Desa (KUD)** adalah suatu organisasi ekonomi yang bersifat sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
11. **Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)** merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan.
12. **Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)** adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman.
13. **Koperasi lainnya**, seperti koperasi serbaguna dan koperasi konsumsi yang sudah berbadan hukum.
14. **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)** merupakan usaha desayang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa di mana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
15. **Embung** adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.

DATA

Mencerdaskan Bangsa
Enlighten The Nation

ISBN 978-623-6248-08-9



9 786236 248089



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEBUMEN**

Statistics of Kebumen Regency

Jl. Arungbinang No. 17A Kebumen 54311 Telp/Fax: (0287) 381163

Homepage: <http://kebumenkab.bps.go.id> E-mail: bps3305@bps.go.id